



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIVAL ABDUL JABAR
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 989523

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.564.000.000**

1. Tanah Seluas 5130 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/153 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 549 m2 di KAB / KOTA BATURAJA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 594.5 m2 di KAB / KOTA BATURAJA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 55000 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **96.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA TYPE V / MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA DUA/BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	251.305.203
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.918.305.203
III. HUTANG	Rp.	161.074.814
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.757.230.389

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.